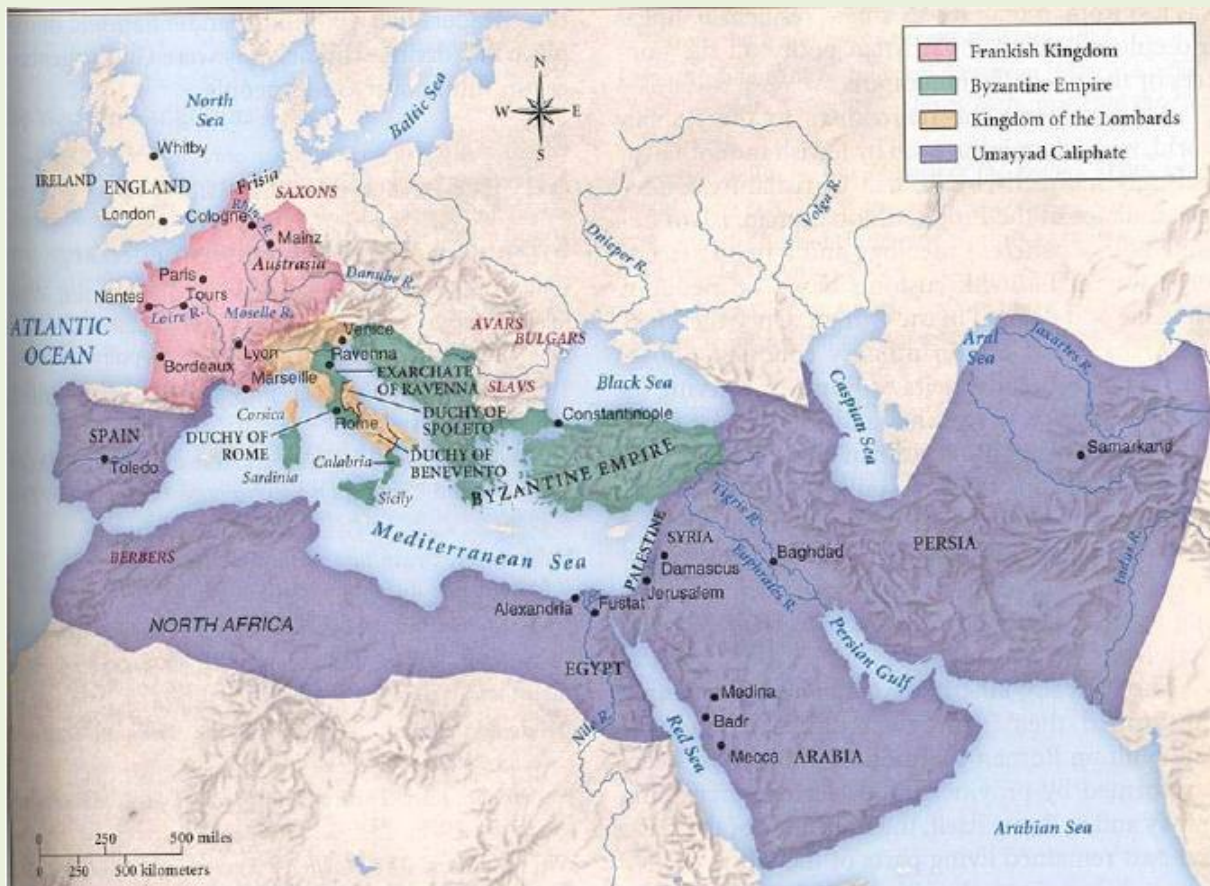


Negara Khilafah Bukanlah Negara Totaliter



Diterjemahkan oleh Rizki S. Saputro

<http://rizkisaputro.wordpress.com>

Khilafah.com 2007

PELARIAN 2007

Gambar ilustrasi di halaman kulit menunjukkan peta Negara Khilafah Islam pada abad pertamanya. Meski menaungi banyak negeri di bawah kekuasaannya, dengan bahasa, tradisi, agama, kebiasaan, hukum, dan budaya yang berbeda-beda, hanya dalam periode waktu yang singkat Islam telah berhasil mengintegrasikan bangsa yang berbeda-beda tersebut ke dalam satu masyarakat yang bersatu padu untuk beberapa abad ke depan.

Tidak seperti Imperium Byzantium (*Rum*) pada kala itu, Khilafah tidak menggapai hal tersebut melalui tirani dan kekuasaan tangan baja. Rakyat yang berada di dalam kekuasaan Khilafah memeluk agama Islam dengan berduyun-duyun serta sepenuh hati mendukung dan menyambut kekuasaan Negara Islam.

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	3
Apakah Totalitarianisme Itu?	5
Fitur Pertama.....	7
Fitur Kedua	10
Fitur Ketiga	12
Fitur Keempat.....	13
Fitur Kelima	16
Fitur Keenam	20
SIMPULAN	23

Bismillaahirrohmaanirrohiim

PENGANTAR

Dukungan yang semakin besar bagi penegakan kembali negara Khilafah kini sangat jelas terlihat. Survey dan polling yang dilakukan secara konsisten dan kontinyu menunjukkan bahwa mayoritas umat Islam menginginkan Syari'ah dan Khilafah.¹

Contoh paling benderang dari dukungan ini ditunjukkan pada bulan Agustus tahun ini, ketika Hizbut Tahrir menginisiasi sebuah konferensi massal di Indonesia. 100.000 warga Muslim datang memenuhi stadion Gelora Bung Karno, dengan jutaan warga Muslim di seluruh desa global menyuarakan dukungannya.²

Seruan bagi Khilafah yang sedang tumbuh ini telah mengirimkan gelombang kejut di seluruh Barat dan para penguasa agen mereka di Dunia Islam. Hasilnya, semua aspek Islam kini diserang, mulai dari aqidah Islam, hingga sistem kekuasaan Islam.

Nabi Muhammad saw. bersabda: 'Sesungguhnya, simpul-simpul Islam akan terurai satu demi satu. Ketika satu simpul hilang, maka umat akan berpegang pada simpul yang satunya lagi yang akan datang setelahnya. Simpul yang pertama kali akan hilang adalah kekuasaan dan simpul yang terakhir adalah Sholat.'³

Ketidakmampuan untuk memberikan argumentasi yang bermutu dalam penentangan mereka terhadap kekuatan aqidah Islam membuat kaum kolonialis kufur terpaksa merendahkan dan menghinakan nabi tercinta, Muhammad saw. Kasus kartun Denmark dan komentar Sri Paus adalah sangat buruk, akan tetapi yang paling buruk terjadi adalah manakala serangan ini terjadi di negeri Muslim, Bangladesh di bulan suci Ramadhan.⁴

Beberapa minggu setelah Konferensi Khilafah di Indonesia, George Bush Jr. memberikan pidato yang menjanjikan perlawanan bagi mereka yang berupaya

¹ WorldPublicOpinion.org dengan dukungan dari University of Maryland, 'Muslims Believe US Seeks to Undermine Islam,' http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/home_page/346.php?nid=&id=&pnt=346&lb=hmpg2.

² Khilafah.com, 'Indonesian Khilafah Conference 2007,' <http://www.khilafah.com/kcom/activism/asia/international-khilafah-conference-2007.html>.

³ At-Tabrani.

⁴ Khilafah.com, 'HT Bangladesh calls upon the people to protest against insulting cartoons of Prophet Muhammad (saw),' <http://www.khilafah.com/kcom/activism/asia/ht-bangladesh-calls-upon-the-people-to-protest-against-insulting-cartoons-of-prophet-muhammad-saw.html>.

menegakkan kembali Khilafah. Ia mengatakan bahwa Amerika sebenarnya sedang ‘terlibat dalam sebuah pertempuran ideologis –menempuri kaum ekstremis di seluruh penjuru bumi.’ Ia kemudian mendefinisikan para ekstremis tersebut sebagai mereka-mereka yang ‘berharap untuk menerapkan visi yang sama gelapnya di seluruh Timur Tengah dengan menegakkan sebuah kekhilafahan yang radikal dan penuh kekerasan yang terbentang dari Spanyol hingga Indonesia.’⁵

Kampanye propaganda jahat ini tidaklah mengagetkan bagi orang-orang yang beriman. Ketika Nabi saw. memulai dakwahnya di Makkah, kaum Quraysh awalnya mengacuhkannya dan menganggap seruan Nabi saw. hanya akan berkisar mengenai kependetaan dan kebijakan, dan orang-orang pada akhirnya akan kembali pada keyakinan orang tua dan nenek moyang mereka. Kapan saja beliau (saw.) lewat di depan mereka, mereka akan berkata: ‘Inilah anak dari Abdul Muttalib yang berbicara dari surga.’⁶

Akan tetapi, ketika dakwah Nabi saw. mulai memiliki akar di Makkah dan memiliki dampak yang kuat pada rakyatnya, maka pada saat inilah penyiksaan, propaganda, dan boikot terhadap kaum Muslimin dimulai. Karena dakwah menyeru kepada Khilafah pada saat ini telah mengakar di negeri-negeri Muslim, kita dapat melihat kampanye penyiksaan dan propaganda yang sama sedang dipergunakan untuk mencegah penegakan kembali Khilafah.

Sebagian dari kampanye ini adalah dengan memfitnah Khilafah dengan begitu kuat sehingga ‘patokan-patokan luar biasa’ seperti pembunuhan, penyiksaan, dan kamp-kamp konsentrasi seperti di Teluk Guantanamo dapat dijustifikasi oleh Barat dalam rangka menghambat tegak kembalinya Khilafah.

Di sinilah modus ‘pengecatan’ Khilafah dengan menggunakan warna yang sama dengan Nazi Jerman dapat dipahami. Sebab Nazisme mewakili personifikasi setan bagi pemerintahan Barat dan mereka akan mendukung patokan kebijakan apapun yang ditujukan untuk mencegah tegak kembalinya Khilafah.

Inilah mengapa para musuh Islam seperti kalangan neo-konservatif di Amerika Serikat dan para pengikutnya di Eropa telah memulai sebuah kampanye jahat untuk menyamakan Islam dengan Nazisme dan totalitarianisme.

⁵ George Bush, ‘President Bush Addresses the 89th Annual National Convention of the American Legion,’ 28 Agustus 2007, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/08/20070828-2.html>.

⁶ Taqiuddin an-Nabhani, ‘The Islamic State,’ diterjemahkan dari *Damlah Islamiyya*, Khilafah Publications, h. 10.

Apakah Totalitarianisme Itu?

Totalitarianisme adalah istilah teknis yang ditujukan untuk menjabarkan pemerintahan yang otoritas politiknya dijalankan secara absolut di mana terdapat kontrol terpusat atas seluruh aspek kehidupan. Individu berada dibawah kendali negara dan setiap oposisi terhadap ekspresi politik dan budaya benar-benar ditekan.⁷

Aspek-aspek penerapan totalitarianisme secara longgar dapat dilihat di setiap negara di dunia. Di Barat, peningkatan pelanggaran kebebasan sipil oleh negara melalui patokan kebijakan seperti tekanan-tekanan politik, penyiksaan, dan menyebarluasnya kegiatan mata-mata di dalam negeri, sesungguhnya mencerminkan banyak sekali aspek dari negara totaliter.

Akan tetapi, di dalam atmosfer politik perang Amerika melawan teror, penggunaan istilah tersebut terhadap umat Islam hanya akan memiliki satu konteks yang berlaku/dapat dipahami, yakni tekanan terhadap siapapun yang menyeru kepada keniscayaan masa depan Khilafah.

Presiden AS, George W. Bush mengatakan:

Khilafah ini akan menjadi sebuah imperium Islam yang totaliter yang meliputi seluruh tanah-tanah Muslim saat ini dan tanah-tanah Muslim di masa lalu, yang membentang dari Eropa hingga Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Tenggara.⁸

David Cameron, pimpinan Partai Konservatif di Inggris mengatakan:

Kekuatan pendorong dan yang ada di balik ancaman terorisme hari ini adalah fundamentalisme kelompok Islamis. Perjuangan yang kita terlibat di dalamnya, pada akhirnya, adalah ideologis. Selama satu abad terakhir ini satu rumpun pemikiran Islamis telah dikembangkan, yang seperti totaliterianisme lainnya, seperti Nazisme dan Komunisme, ia menawarkan kepada para pengikutnya sebuah bentuk pembebasan melalui kekerasan.⁹

⁷ The American Heritage Dictionary of the English Language, 'Dictionary definition of totalitarian,' Edisi Keempat.

⁸ George W. Bush, 'Global War on Terror,' pidato di Capital Hilton Hotel, 5 September 2006, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/09/20060905-2.html>.

⁹ David Cameron, 'Speech to Foreign Policy Think Tank,' 24 Agustus 2005, <http://education.guardian.co.uk/faithschools/story/0,13882,1555406,00.html>.

Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris mengatakan:

Timur Tengah telah mengeksport sebuah ideologi mempatikan ke luar wilayahnya, ideologi yang didasarkan pada distorsi keimanan yang sebenarnya dari Islam, yang diartikulasikan dengan ketangkasan setan melalui permainan terhadap ketakutan dan keluhan umat Islam di semua tempat.

Analogi dengan masa lalu tidaklah pernah benar-benar tepat, dan analogi-analogi yang dilakukan terutama dengan munculnya fasisme dapat dengan mudah menyesatkan. Akan tetapi, secara kronologis murni, saya kadang bertanya-tanya jikalau kita tidak sedang berada di era tahun 1920an atau 1930an lagi.¹⁰

Fitur-fitur kunci dari sebuah rezim totaliter didefinisikan oleh sejarawan AS, Carl Friedrich dan Zbigniew Brzezinski, di dalam buku mereka *Totalitarian Dictatorship and Autocracy* (1956). Model (secara epistemologis lebih tepat disebut sebagai tipologi –pentj.) mereka didasarkan pada sejarah abad ke-dua puluh (terutama terkait Komunisme dan Nazisme) dan di dalamnya ada enam fitur kunci:

1. Adanya sebuah ideologi resmi di mana dituntut adanya ketaatan umum. Ideologi tersebut ditujukan untuk meraih sebuah ‘tahap akhir umat manusia yang sempurna.’
2. Adanya sebuah partai massa tunggal, yang diorganisasi secara hirarkis, dan berhubungan dekat sekali dengan birokrasi negara, dan secara khusus dipimpin oleh satu orang.
3. Adanya kendali monopolistik atas angkatan bersenjata.
4. Adanya monopoli peralatan komunikasi massa efektif.
5. Dijadikannya teror sebagai sistem pengendalian polisional (ketertiban).
6. Adanya kendali dan arahan terpusat bagi seluruh perekonomian.

Tiap dari enam area tersebut akan diuji agar dapat dilihat jikalau model totalitarian dapat merefleksikan semacam persamaan dengan sistem kekuasaan Khilafah.

¹⁰ Tony Blair, Speech at Alfred Emanuel Smith Memorial Foundation Dinner, New York. Dilaporkan dalam koran *The Times*, 19 Oktober 2007, <http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article2693173.ece>.

Fitur Pertama

Sebuah ideologi resmi di mana dituntut ketaatan umum terhadap ideologi tersebut, yang ditujukan untuk mencapai sebuah ‘tahap akhir umat manusia yang sempurna.’

Ideologi Resmi

Khilafah adalah sebuah negara berideologi Islam dan hampir mirip dengan negara ideologis lainnya seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang sistem pemerintahannya dilandaskan kepada pandangannya atas kehidupan. Adapun Khilafah, cara pandang kehidupannya adalah aqidah Islam, yang darinya muncul aturan-aturan syari’ah yang mengatur urusan kehidupan. Bagi negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, cara pandang kehidupan mereka dilandaskan pada sekulerisme, yang darinya muncul sistem demokrasi dan ekonomi Kapitalis –yang menjadi bagian termasyhur dari ideologi mereka– yang oleh sebab itu mereka menyebut diri sebagai negara bangsa Kapitalis.

Meski Khilafah didasarkan pada ideologi Islam, hal ini tidak berarti bahwa setiap orang yang hidup di dalam negara Khilafah harus menjadi Muslim. Kewarganegaraan di dalam negara Khilafah didasarkan kepada ketetapan seseorang untuk bertempat tinggal secara permanen di dalam tanah-tanah yang berada di dalam yurisdiksi negara Khilafah, terlepas dari kebangsaan, etnis, bahkan iman mereka. Tidaklah menjadi prasyarat bagi seseorang untuk menjadi Muslim dan mengadopsi nilai-nilai Islam dalam rangka menjadi warga negara Khilafah. Sehingga, umat Islam yang hidup di luar negara Islam tidak akan menikmati hak-hak kewarganegaraan, sebagaimana yang dapat dinikmati oleh kalangan non-Muslim yang tinggal dan menetap di dalam negara Islam (*darul Islam*).¹¹

Pertanyaan lain bisa jadi muncul terkait banyaknya mazhab (*mazhab*) yang eksis di antara umat Islam, contohnya Sunni dan Shi’ah. Akankah negara Khilafah mengadopsi satu mazhab dan memaksakannya kepada orang lain?

Jawabnya, negara Khilafah hanya mengadopsi legislasi hukum dari syari’at Islam yang dibutuhkan untuk mengelola urusan kehidupan. Ia tidak mengadopsi aturan ketuhanan yang berkaitan dengan ibadah, kecuali Zakat dan Jihad –disebabkan dampak sosial dari dua tipe ibadah tersebut. Ia juga tidak mengadopsi mazhab apapun yang terkait dengan akidah Islam.¹² Oleh karenanya, Khilafah tidak

¹¹ Hizb ut-Tahrir, ‘The Methodology of Hizb ut-Tahrir for Change,’ Al-Khilafah Publications, h. 6.

¹² Taqiuddin an-Nabhani, ‘The draft constitution of the Khilafah State. The Introduction and the incumbent reasons,’ diterjemahkan dari *Muqaddimah Dustur Aw al-Asbabul Mujibatullah*, ayat 4.

akan menjadi negara Sunni atau negara Shi'ah. Setiap Muslim, terlepas mazhab mereka, dipersilahkan untuk mempraktekkan mazhab mereka tanpa campur tangan dari negara.

'Tahapan Final yang Sempurna' – Utopia

Sistem kekuasaan Khilafah tidak bertujuan untuk menegakkan sebuah utopia politik atau penciptaan 'ras berkuasa'. Tujuan pendiriannya sebenarnya sangat sederhana, yakni penerapan syariat Islam.

Allah swt. telah menurunkan syariat Islam agar diaplikasikan kepada umat manusia, bukan kepada malaikat. Tidak pernah ada pengharapan bagi masyarakat Islam untuk menjadi masyarakat yang sempurna, di mana kejahatan tidak pernah dilakukan. Rasulullah saw. bersabda: 'Demi yang nyawaku ada di tangan-Nya, jika kamu tidak pernah melakukan kesalahan, Allah Yang Maha Kuasa akan menyingkirkan kalian dan menggantikan kalian dengan orang-orang yang melakukan kesalahan dan mereka kemudian memohon pengampunan kepada Allah Yang Maha Besar dan Dia akan mengampuni mereka.'¹³

Nabi saw. adalah kepala negara terbaik Negara Islam. Akan tetapi di negara beliau hiduplah umat Islam, non-Muslim, dan orang-orang munafik. Di sana juga ada para pengkhianat, pencuri, dan pembunuh. Di masa-masa para *Khulafaur Rasyidin* banyak sekali muncul permasalahan hingga pada tingkatan fitnah dan pengkhianatan yang pecah di masa kekuasaan Imam Ali kw. Meski demikian, syariat Islam tetap diterapkan dan syariat Islam mampu memecahkan permasalahan dan perselisihan yang muncul.

Lebih lanjut, Nabi saw. memperingatkan umat Islam mengenai masa depan di mana akan ada para penguasa yang suka menindas di dalam Khilafah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Huzayfah ibnu Yamaan bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Akan ada para Imam setelah aku yang tidak akan dibimbing oleh aturan-aturan yang diturunkan kepadaku, dan tidak pula mereka bertindak berdasarkan Sunnahku; beberapa manusia akan bangkit di antara kalian dengan hati setan di dalam tubuh manusia mereka.' Huzayfah bertanya, 'Apa yang harus aku lakukan, jika aku ada pada masa itu?' Beliau (saw.) menjawab, 'Engkau harus mendengar dan taat pada Amir bahkan jika ia mencambuk punggungmu dan mengambil uangmu; dengarlah dan taatlah.'¹⁴

Muslim Sebagai 'Ras Berkuasa'

Islam tidak meyakini konsep penciptaan umat Islam sebagai 'ras berkuasa' di mana semua non-Muslim dipaksa untuk memasuki Islam. Eksistensi non-Muslim dan tempat peribadatan mereka di Dunia Muslim –padahal Islam telah berkuasa di

¹³ Shahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah ra.

¹⁴ Shahih Muslim, diriwayatkan dari Huzayfah ibnu Yamaan.

wilayah tersebut selama lebih dari 1300 tahun— adalah bukti yang terang bahwa hal ini (ras berkuasa) tidak pernah diperintahkan.¹⁵

Rasulullah saw. menulis pada rakyat Yaman: ‘Siapa saja yang bersikukuh pada Keyahudiannya atau Kekristenannya tidak akan disiksa atas pilihannya, dan ia diwajibkan untuk membayar jizyah.’¹⁶

Makna dari ‘tidak akan disiksa atas pilihannya’ bermakna bahwa kalangan *dhimmi* (warga negara non-Muslim) tidak dipaksa untuk menanggalkan iman dan peribadatan mereka.¹⁷

¹⁵ Khilafah.com, ‘Dhimmi: Non-Muslims living in the Khilafah,’ <http://www.khilafah.com/kcom/the-khilafah/non-muslims/dhimmi-non-muslims-living-in-the-khilafah.html>.

¹⁶ Abu ‘Ubayd al-Qasim ibnu Sallam, ‘The Book of Revenue,’ Terjemahan dari *Kitab al-Ammal*, Garnet Publishing Ltd, p. 25.

¹⁷ Taqiuddin an-Nabhani, ‘The Islamic Personality,’ Volume 2, diterjemahkan dari Syakhsiyyah Islamiyyah, Darul Ummah, Beirut, Edisi Keempat, Bab *Abkam ad-dhimmiy*.

Fitur Kedua

Satu Partai massa tunggal

Dalam model negara totaliter tradisional seperti Komunisme dan Nazisme, terdapatlah satu partai resmi. Di Uni Sovyet ia adalah Partai Komunis, sedangkan bagi Nazi Jerman, ia adalah Partai Sosialis Nasional Jerman (*Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei*) yang kemudian disingkat menjadi kata Nazi. Lebih dekat di masa kita, terdapatlah Partai *Ba'ats* di Irak pada masa Saddam Hussein berkuasa, sebagai partai resmi negara, sementara partai-partai lainnya dipaksa untuk bergerak di bawah tanah.

Setiap warga negara jika ingin mengalami kemajuan (mobilitas sosial vertikal –pentj.) di dalam masyarakat, mereka ‘perlu’ untuk bergabung dengan partai resmi negara. Mereka yang tidak bergabung akan dipandang dengan penuh kecurigaan serta tidak mendapat hak perlakuan dan perlindungan yang sama sebagaimana yang didapatkan oleh para anggota partai.

Negara-negara di Barat menganut model demokrasi multi-partai dengan banyak sekali partai politik yang eksis dan berusaha meraih kekuasaan. Meskipun pada kenyataannya, biasanya hanya ada dua partai politik besar yang memiliki peluang untuk meraih kekuasaan. Di Amerika, ia adalah pilihan di antara Republik atau Demokrat; dan di Inggris, ia adalah antara Buruh dan Konservatif.

Partai Politik di dalam Islam

Islam bukan hanya membolehkan pendirian partai politik, tetapi membuatnya menjadi kewajiban umat Islam untuk mendirikan setidaknya satu partai. Meski dalam banyak kasus anggota pemerintahan merupakan anggota partai politik, Khilafah tidak memiliki sistem kekuasaan kepartaian sebagaimana yang mudah ditemukan di negara demokrasi Barat. Dengan kata lain, tidak ada partai tunggal yang menguasai Negara.

Partai politik di dalam negara Khilafah didirikan terutama untuk *accounting* –mengawasi dan meminta pertanggungjawaban dari– kepala negara (Khalifah) dan pemerintahannya. Tugas mereka adalah menjadi penjaga Islam di masyarakat dan memastikan pemerintahan tidak menyimpang dari implementasi dan dakwah Islam. Tidak ada prasyarat untuk bergabung dengan suatu partai dalam rangka menjadi anggota pemerintahan Islam atau untuk mengalami mobilitas sosial vertikal di dalam masyarakat.

Hak warga negara Khilafah untuk mendirikan partai politik didapatkan dari Kitab Suci Al-Qur’an. Tidak ada perijinan yang diperlukan dari pemerintah untuk mendirikan partai-partai tersebut, sebab syariat telah memberikan ijinnya bagi hal ini.

Berikut ini adalah ayat dari Qur'an yang memerintahkan pendirian partai politik.

Allah swt. berfirman,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Hendaklah ada di antara kalian (umat Islam) segolongan orang yang menyeru pada *al-keboyr* (Islam), memerintahkan yang *ma'ruf* (kebaikan), dan melarang kemungkaran, dan merekalah orang-orang yang menang/beruntung.
[Q.S. 3 –Ali Imran– 104]

Perintah untuk mendirikan sebuah kelompok atau kelompok-kelompok adalah perintah untuk mendirikan partai politik. Hal ini dideduksi dari fakta bahwa ayat tersebut telah menentukan tugas dan kewajiban kelompok ini, yakni menyeru pada Islam, memerintahkan kebaikan, dan melarang kemungkaran. Tugas memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran adalah umum dan tidak ada batasan. Oleh sebab itu hal ini berarti termasuk seruan, perintah, dan larangan terhadap para penguasa, di mana hal ini menyiratkan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap mereka. Mengawasi penguasa adalah sebuah tugas politis yang dilakukan oleh partai politik, dan ia merupakan tugas paling penting dari partai politik. Jadi, ayat tersebut mengindikasikan tugas bagi pendirian partai politik yang menyeru kepada Islam, memerintahkan kebaikan, dan melarang kemungkaran, serta mengawasi tindakan dan perilaku para penguasa.¹⁸

Oleh karenanya, fungsi partai politik di dalam negara Khilafah bukanlah untuk meraih kekuasaan, sebab di dalamnya tidak ada konsep sistem pemerintahan kepartaian. Partai politik Islam yang banyak dapat eksis dan mereka akan bekerja demi kebaikan seluruh masyarakat ketimbang kepentingan sempit mereka sendiri, sebagaimana sering kita dapati di negara Barat.

¹⁸ Taqiuddin an-Nabhani, 'The Ruling System in Islam,' diterjemahkan dari *Nidzamul Hukmi fil Islam*, Khilafah Publications, Edisi Kelima, h. 297.

Fitur Ketiga

Kendali monopolistik angkatan bersenjata

Negara Khilafah bukanlah rezim militer. Khalifah adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan menunjuk seluruh jenderal dan Kepala Staff.¹⁹ Khalifah bukanlah Panglima Tertinggi yang seremonial belaka sebagaimana banyak kita temui di kebanyakan negara Barat, tetapi ia sendirilah yang menjadi supervisor militer dan kebijakan perang, internal dan eksternal negara. Ini memastikan agar angkatan bersenjata berada di bawah kendali eksekutif pemerintahan dan agar tidak dapat mandiri –keadaan yang seringkali berujung pada kudeta terhadap pemerintahan– sebagaimana yang sering kita lihat terjadi di berbagai kesempatan di negeri-negeri Muslim seperti Turki dan Pakistan. Meski demikian, hal ini tidak mengisyaratkan bahwa negara Khilafah adalah rezim militer yang memaksakan hukum melalui para tentaranya.

Pemikiran (cara berpikir dan cara kerja –pentj.) militer tetap dipisahkan sepenuhnya dari pemikiran politik –yang dibutuhkan agar pengurusan urusan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Meskipun pemikiran militer sangatlah penting di dalam dua konteks sempit –yakni pembangunan aparatur militer yang kuat dan menjalankan kebijakan perang– pemikiran militer tidak boleh melampaui dua konteks peran ini. Ini disebabkan karena pada saat para prajurit menjalankan pekerjaan mereka dalam kapasitas militer mereka, mereka menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan keahlian mereka, yakni secara militeristik. Mereka tidak mengijinkan adanya pertimbangan-pertimbangan seperti dampak dari opini publik dunia, upaya-upaya diplomatis, kekuatan spiritual dan moral atau nilai penting dari manuver politik. Opini militer hanyalah satu opini di antara banyak opini yang dipergunakan dan dipertimbangkan oleh Khalifah dalam memformulasikan keputusan politisnya atas sebuah permasalahan.²⁰

Mencegah Penyalahgunaan Angkatan Bersenjata

Militer bukanlah monopoli Khalifah yang dipergunakan demi kepentingan pribadinya. Angkatan bersenjata hanya dapat dipergunakan untuk alasan-alasan syari'ah yang absah. Mereka tidak dapat dipergunakan secara ilegal dan digunakan untuk melakukan penindasan. Jika, untuk suatu alasan, dapat dipertimbangkan bahwa angkatan bersenjata telah disalahgunakan oleh Khalifah, maka Mahkamah Perilaku Tidak Adil (*Mahkamah Madzhalim*), sebuah badan pengadilan independen, akan menyelidiki permasalahan tersebut dan membuat sebuah keputusan untuk menyelesaikan persengketaan.²¹

¹⁹ Taqiuddin an-Nabhani, 'The draft constitution of the Khilafah State,' *op cit.*, ayat 61.

²⁰ Taqiuddin an-Nabhani, 'The Islamic Personality,' *op cit.*, Bab 'The Meaning of the Khaleefah Supervising the Army's Leadership.'

²¹ Taqiuddin an-Nabhani, 'The draft constitution of the Khilafah State,' *op cit.*, ayat 78.

Fitur Keempat

Monopoli peralatan komunikasi massa efektif

Pemerintahan Khilafah tidak memonopoli media. Setiap warga negara Negara Islam diperbolehkan untuk mendirikan dan menerbitkan media apapun, entah koran, majalah, radio, atau televisi. Perijinan tidak diperlukan untuk mendirikan tipe-tipe media tersebut, meski Departemen Informasi (*Da'iratul I'laam*) harus diberi informasi atas pendirian media-media tersebut.²²

Sebagaimana terjadi di setiap negara, ada batasan-batasan umum pers dan mereka harus bekerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Informasi yang sensitif terkait keamanan nasional tidak dapat dipublikasikan tanpa ijin terlebih dahulu dari Departemen Informasi. Fitnah dan perusakan nama baik, hasutan, rasisme, penghinaan terhadap keyakinan beragama, dan perkembangbiakan akhlak rusak dan budaya sesat, tidak diperbolehkan oleh syari'ah.

Di luar batasan-batasan tersebut, media massa di dalam negeri Khilafah memiliki hak penuh untuk mengawasi Khalifah dan pemerintahannya, menyidiki setiap kezaliman yang dilakukan pemerintah atau isu-isu lain yang membahayakan – atau yang memang menjadi – kepentingan masyarakat pada umumnya. Media dapat melakukan penyelidikan dan menerbitkannya tanpa ada perlu takut terhadap adanya penangkapan atau penganiayaan.

Peran media di dalam setiap masyarakat, terutama Khilafah, tidak dapat diremehkan. Pekerjaan mereka merupakan praktek dari kewajiban umum memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, yang merupakan kewajiban setiap warga negara.

Rasulullah saw. bersabda: 'Demi Dia yang jiwaku ada di tangannya, kalian harus memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, jikalau tidak Allah akan menimpakan hukumanNya kepada kalian. Dan kemudian jika kalian berdoa kepadaNya (untuk meminta pertolongan), Dia tidak akan menjawab kalian.'²³

Islam juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap para penguasa tiran, bahkan jika hal itu dilakukan akan menyebabkan kematian.

Rasulullah saw. bersabda: 'Penghulu para mujahid adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan orang yang berdiri di depan penguasa yang zalim untuk

²² Hizb ut-Tahrir, 'Khilafah State Organisations,' diterjemahkan dari *Ajbiqatu Dawlah al-Khilafah*, Darul Ummah, Beirut, 2005, Edisi Pertama, Bab *al-I'laam*.

²³ Musnad Ahmad, diriwayatkan oleh Huzayfah.

memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkarannya kepadanya, kemudian ia (penguasa tersebut) membunuhnya.²⁴

Warga Muslim biasa di dalam negara Khilafah tidak akan takut kepada siapapun kecuali Allah swt. Ini akan memberikan kepada mereka kekuatan untuk berhadapan dengan Khalifah dan memaksakan pertanggungjawaban Khalifah jika diperlukan. Hal ini diilustrasikan dalam contoh berikut di masa Khalifah Mu'awiyah ra.

Suatu hari, Jariyah Ibnu Qudama Al-Saadi memasuki istana Mu'awiyah yang pada saat itu adalah kepala negara Islam. Kebetulan tiga menteri dari Kaisar Romawi juga hadir di sana. Mu'awiyah berkata kepada Jariyah: 'Bukankah engkau adalah salah satu sekutu Ali (bin Abi Thalib kw.–pentj.) dalam segala pendapatnya?' Jariyah berkata: 'Kesampingkanlah Ali, karena kami tidak memandang rendah dirinya dan mencintainya, dan tidak pula kami telah mencurangnya karena kami malah menasihati dirinya.'

Karena kata-kata tersebut Mu'awiyah berkata pada Jariyah: 'Terkutuklah engkau wahai Jariyah! Engkau pasti dipandang rendah di mata orang tuamu, karena mereka memanggil engkau Jariyah (yang berarti budak perempuan atau pembantu –pentj.).'

Jariyah membalas: 'Engkau pasti dipandang rendah di mata orang tuamu, karena mereka memanggil dirimu Mu'awiyah, anjing betina penuh nafsu yang menyalak demi memikat para anjing.'

Mu'awiyah berteriak: 'Tutup mulutmu wahai yang tidak memiliki ibu!' Jariyah membalas: 'Engkau yang diam hai Mu'awiyah (ia tidak menyebutnya *Amirul Mukminin*), karena aku memiliki seorang ibu yang mengandungku demi pedang-pedang yang mana kami hadapkan kepadamu suatu hari nanti. Maka kami kemudian memberikan padamu janji setia kami (*bai'at* –pentj.), untuk mendengar dan taat, selama engkau memerintah kami dengan apa yang telah Allah turunkan. Maka jika engkau memenuhi janjimu, kami akan memenuhi loyalitas kami padamu, dan jika engkau gagal memenuhi janjimu, ingatlah bahwa di belakang kami terdapat beberapa orang ganas dan banyak sekali persenjataan, yang tidak akan mengizinkan dirimu menganiaya atau menimpakan bahaya pada diri mereka.'

Mu'awiyah memekik: 'Semoga Allah menjauhkan kami dari orang-orang seperti dirimu!'

²⁴ Sunan Abu Dawud.

Jariyah membalas: ‘Kamu! (lagi-lagi ia tidak mengatakan *Amirul Mukminin*), katakanlah sesuatu yang baik dan bersopan santunlah, karena penguasa yang buruk akan dibakar api neraka.’ Jariyah kemudian pergi dengan mengomel dan marah, bahkan perginya tanpa meminta ijin/permisi pada Mu’awiyah.

Tiga menteri menoleh pada Mu’awiyah dan salah seorang dari mereka berkata: ‘Kaisar kami tidak akan menanggapi satu pun warganya kecuali mereka merendahkan dahi mereka di dasar singgasananya. Jika suara orang yang berada di dekatnya atau siapapun dari keluarga terdekatnya dikeraskan, tubuh mereka bisa dicacah, atau dibakar, maka bagaimana bisa warga gurun Arab yang kasar ini, dengan perilakunya yang tidak sopan, datang lalu mengancam dirimu seperti ini? Selayak-layaknya ia setara dengan dirimu?’

Mu’awiyah tersenyum lalu berkata: ‘Aku berkuasa atas manusia, yang tiada takut pada celaan ketika yang dikatakan itu merupakan kebenaran, dan semua rakyatku di gurun Arab ini seperti itu, tiada di antara mereka yang merendahkan diri kecuali pada Allah swt., tiada dari mereka yang berdiam diri terhadap ketidakadilan dan diriku tidaklah lebih tinggi, ataupun lebih baik ketimbang mereka, kecuali dalam hal kealiman. Aku telah mengatakan beberapa kata kasar pada orang itu dan ia merespon dengan benar, dirikulah yang memulainya, maka dirikulah yang harus disalahkan ketimbang dirinya.’

Mendengar ini, meledaklah tangis menteri senior Romawi, hingga Mu’awiyah bertanya alasan dirinya menangis, maka dijawablah: ‘Kami telah memiliki pemikiran sebelum hari ini bahwa kami setara denganmu dalam hal perlindungan dan kekuatan, tetapi setelah menyaksikan hal ini, saya takut jika satu hari nanti engkau akan menyebarkan kekuasaanmu atas imperium kami.’²⁵

²⁵ Jalaluddin as-Suyuti, ‘Tarikhul Khulafa.’

Fitur Kelima

Teror sebagai sistem kendali polisional (ketertiban umum)

Khilafah bukanlah negara polisi. Penyiksaan, kegiatan spionase, dan penangkapan serta penahanan sewenang-wenang, semuanya terlarang. Penerapan Islam bergantung terutamanya pada ketakwaan seorang Muslim (kesadaran hubungan dengan Tuhan). Mereka menaati hukum sebagaimana ketaatan mereka kepada Allah swt. Ini menihilkan kebutuhan bagi ribuan kamera CCTV yang mewabah di kebanyakan kota-kota Barat dalam rangka mencegah kejahatan.

Lebih jauh, umat Islam yakin terhadap tanggung jawab mereka ketimbang kebebasan mereka. Spirit kolektif yang dibantu perkembangannya di dalam negara Khilafah untuk melakukan kebaikan dan perilaku budiman dapat diartikan bahwa orang-orang akan ikut campur jika mereka menyaksikan perilaku kriminal apapun. Budaya membutakan mata terhadap kejahatan yang lazim di Barat tidak akan terjadi di dalam negara Khilafah. Kembali lagi, ini terjadi karena kewajiban umum untuk memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran yang telah dijabarkan di muka.

Oleh karenanya, penahanan, pembuktian dan penghukuman mereka-mereka yang tidak taat terhadap hukum di negara Khilafah dipandang sebagai upaya terakhir. Bahkan ketika berurusan dengan para pelaku kejahatan, mereka memiliki hak penuh untuk proses pengadilan dan mereka tidak dapat diperlakukan seenaknya atau disiksa untuk mendapatkan pengakuan. Setiap pengakuan yang didapat dari penyiksaan atau persaksian palsu ditolak sepenuhnya. Mereka yang memberikan kesaksian palsu atau yang menyiksa setiap tersangka di dalam pengadilan Islami akan berhadapan dengan hukuman yang keras.

Penyiksaan Diharamkan

Penyiksaan terhadap setiap orang di dalam negara Khilafah adalah diharamkan tanpa memandang keuntungan apapun yang mungkin didapat dari perilaku tersebut, seperti informasi intelejen. Khilafah tidak merendahkan dirinya sendiri kepada perilaku tercela sebagaimana yang dilakukan bangsa Amerika dan Israel dalam metode-metode 'hukuman negara' yang penuh penyiksaan.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Hisyam bin Hakim, yang berkata: 'Saya bersumpah bahwa saya menyaksikan Rasulullah saw. bersabda: 'Allah akan menghukum mereka-mereka yang menghukum orang-orang (dengan tidak *syar'i* –pentj.) di Dunia.'²⁶

²⁶ Shahih Muslim, diriwayatkan oleh Hisyam bin Hakim.

Proses Pengadilan

Penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang tanpa adanya pengadilan adalah terlarang di dalam negara Khilafah. Prinsip hukum *habeas corpus*²⁷ di dalam Khilafah eksis, di mana setiap orang yang ditahan harus diadili di pengadilan dan perkara mereka diselidiki oleh seorang hakim (*qadhi*).

Rasulullah telah memerintahkan agar dua pihak yang bertikai duduk di dalam sebuah pengadilan.²⁸

Semua tersangka dipraduga tak bersalah hingga terbukti bersalah oleh sebuah pengadilan syari'ah.

Rasulullah saw. bersabda: 'Penuntutlah yang harus menyediakan bukti-bukti, dan sumpah diwajibkan bagi mereka yang tidak setuju (pada tuduhan dan bukti dari penuntut –pentj.)"²⁹

Ruang Privat/Publik

Fitur lain dari negara totaliter adalah kebijakannya untuk menjaga ketertiban (*policing*) dan memata-matai rakyat mereka di dalam rumah-rumah mereka dan urusan-urusan privat mereka. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Khilafah melakukan adopsi hukum yang minimal terhadap hukum-hukum Islam. Ia hanya mengadopsi hukum-hukum yang dibutuhkan untuk mengelola urusan publik negara. Ia tidak akan mengadopsi hukum-hukum di wilayah ibadah, dan aqidah, kecuali masalah Zakat dan Jihad. Hal ini mencegah munculnya permasalahan di antara beragam mazhab seperti Sunni dan Shi'ah yang hidup bersama di dalam negara Khilafah.

Bagi warga negara non-Muslim (*dzimmi*) mereka dibiarkan untuk mempraktekkan agama-agama mereka dan praktek-praktek yang berhubungan dengan keyakinan mereka, seperti meneguk khamr, melahap babi, pernikahan dan perceraian.³⁰

Kesucian rumah seseorang di negara Khilafah tidak dapat dilanggar dengan memata-matai mereka.

Rasulullah saw. bersabda: 'Ia yang mengintip ke dalam rumah seseorang tanpa ijin dari mereka (sang pemilik rumah), maka diperbolehkan bagi

²⁷ Pemberian justifikasi hukum bagi terduga/tersangka sebelum dilakukan persidangan, sehingga terduga/tersangka layak untuk diberikan persidangan yang adil.

²⁸ Sunan Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubayr.

²⁹ Al Baihaqqi.

³⁰ Taqiuddin an-Nabhani, 'The draft constitution of the Khilafah State,' *op cit.*, ayat 7.

mereka (sang pemilik rumah) untuk mencungkil keluar kedua bola matanya (sang pengintip).³¹

Allah swt. juga berfirman di dalam Kitab Suci Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan (memata-matai) orang lain...

[Q.S. 49 –Al-Hujuraat– 12]

Allah swt. melarang kegiatan mata-mata di dalam ayat ini ketika Dia (swt.) berfirman –‘janganlah mencari-cari keburukan’ (*Wa laa tajassasum*). Pelarangan ini berlaku secara umum, meliputi semua kegiatan mata-mata, baik memata-matai untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain, baik dilakukan demi negara, individu, atau kelompok, dan baik bagi subyek yang melakukannya, yakni yang memata-matai adalah penguasa atau rakyat/subyek yang dikuasai. Ayat tersebut juga meliputi pelarangan terhadap obyek apapun yang dimata-matai di dalam negara Khilafah. Oleh karenanya, tidaklah diperbolehkan bagi negara Khilafah untuk memata-matai warga negaranya, baik Muslim ataupun *dzimmi*.³² Perkecualian satu-satunya adalah ketika ada bukti yang terang bahwa seorang warga negara Khilafah sedang dipergunakan oleh negara lain untuk memata-matai Khilafah – maka hal ini dapat diinvestigasi tanpa melanggar hak-hak kewarganegaraan secara umum.³³

Sebuah contoh dari kesucian rumah-rumah seseorang dan ketidakbolehan pencarian kegiatan kriminal di dalamnya dapat kita peroleh dari masa *Khulafaur Rasyidin* Islam yang kedua, Umar bin Al-Khattab ra.

Umar bin Khattab, saat itu sedang melakukan patroli malamnya di Madinah ketika ia mendengar seseorang sedang bernyanyi di dalam sebuah rumah. Ia memasuki rumah tersebut dengan memanjat sebuah sisi dinding dan menemukan anggur dan seorang wanita bersama lelaki tersebut.

Umar berkata ‘Kamu adalah musuh Allah. Apakah kamu pikir Allah, Segala Keagungan bagiNya, tidak akan menyingkap dirimu ketika kamu melakukan sebuah dosa?’ Lelaki itu berkata: ‘Dan engkau wahai Amirul Mukminin!

³¹ Musnad Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

³² Taqiuddin an-Nabhani, ‘The Islamic Personality,’ *op cit.*, Bab ‘Spying.’

³³ Hizb ut-Tahrir, ‘Khilafah State Organisations,’ *op cit.*, Bab ‘The tasks of the internal security department.’

Janganlah terlalu keras pada diriku. Aku tidak taat kepada Allah hanya dalam satu perkara, sementara dirimu tidak taat kepadaNya dalam tiga perkara:

Allah swt. berfirman: *'Wa laa tajassum'* dan engkau memata-matai.

Allah swt. berfirman: *'Dan masukilah rumah-rumah melalui pintu-pintunya'* [*wa'tul buyuuta min abwaabiha* – QS. Al-Baqarah 189] dan engkau telah memanjat sebuah dinding.

Allah swt. berfirman: *'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.'* [*Yäa ayyuhalladziyna amanun laa tadkhubun buyuntan ghoyro buyuntikum hattaa tasta'nisun wa tusallimun 'alä ahliha* – QS. An-Nuur 27] dan engkau telah memasuki rumah tanpa permisi.'

Umar ra. Berkata *'Akankah kamu menjadi orang yang lebih baik (taat pada Allah) jika aku memaafkan dirimu?'* Lelaki itu menjawab *'Ya.'* Umar memaafkannya dan pergi keluar.³⁴

³⁴ Al-Khara'iti, dikutip dalam *"Makarim Al-Akblaq"* diriwayatkan oleh Thawr Al-Kendi.

Fitur Keenam

Kendali dan arahan terpusat atas keseluruhan ekonomi

Negara Khilafah tidak memiliki sebuah ekonomi terencana di mana pemerintah mengendalikan dan mengatur masalah produksi, distribusi, dan harga melalui semacam rencana makro-ekonomi yang meliputi segala hal. Kepemilikan pribadi atas tanah, pabrik-pabrik, toko-toko, dan perusahaan-perusahaan dalam rangka menghasilkan keuntungan benar-benar digalakkan di dalam negara Khilafah.

Rasulullah saw. bersabda, ‘Para pedagang yang jujur dan terpercaya akan menjadi rombongan para nabi, orang-orang yang lurus dan para syahid.’³⁵

Syari’ah membatasi intervensi negara dalam perekonomian di dalam banyak wilayah. Pelanggaran atas batasan ini yang dilakukan oleh negara akan dipandang sebagai kezaliman pemerintah yang dapat dipersidangkan di *Mahkamah Mazalim*. Meski demikian, negara Khilafah tidak mengizinkan konsep kebebasan kepemilikan seperti di dalam Kapitalisme di mana jika ada permintaan (*demand*) yang cukup maka perusahaan-perusahaan dapat menawarkan barang-barang (*supply*) bahkan jika hal tersebut membayak dan merusak masyarakat luas (seperti narkoba, *khamr*, pornografi, dll –pentj.).

Kepemilikan Publik/Privat

Di dalam negara Khilafah, Islam membuat pembedaan antara kepemilikan privat dan kepemilikan publik. Tidak ada konsep nasionalisasi di mana kepemilikan privat ditransfer menjadi kepemilikan negara jika negara memandang kepemilikan tersebut merupakan kepentingan publik. Hanya jika sifat alamiah kepemilikan tersebut berubah, maka ia dapat dipertimbangkan sebagai kepemilikan publik dan penguasaannya ditransfer kepada negara.³⁶ Terdapat tiga tipe kepemilikan publik yang didefinisikan oleh Syari’at:

1. Yang dianggap sebagai keperluan publik (*public utility*), sehingga sebuah kota atau suatu komunitas akan membubarkan diri demi mencarinya jika ia tidak tersedia. Contohnya: air, listrik, cadangan gas dan minyak bumi.
2. Penyimpanan segala bentuk mineral yang tidak dapat dihitung.
Contohnya: pertambangan berlian.

³⁵ At-Tirmidzi

³⁶ Taqiuddin an-Nabhani, ‘The Economic System of Islam,’ diterjemahkan dari *Nizham al-Iqtisadiyah*, Al-Khilafah Publications, Edisi Keempat, h. 212.

3. Barang-barang yang secara alamiahnya akan mencegah seseorang dari kepemilikan atasnya. Contohnya: sungai-sungai, lautan, danau-danau, kanal-kanal publik, teluk-teluk, selat-selat.³⁷

Diluar kategori tersebut, semua properti lain merupakan kepemilikan privat dan dapat dikuasai oleh individu. Perkecualian bagi hal ini hanya pada properti yang menjadi milik negara, seperti gedung-gedung pemerintahan, pendapatan dari pajak, dan persenjataan militer. Mereka ini disebut sebagai kepemilikan negara.³⁸

Oleh karenanya, faktor-faktor produksi seperti tanah, buruh, dan modal, tidak dikuasai dan dikendalikan oleh negara sebagaimana terjadi dalam perekonomian terencana atau perekonomian komando.

Penetapan Harga

Negara Khilafah tidak dapat ikut campur secara langsung dalam perekonomian untuk memperbaiki tingkat harga.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas ra. yang berkata: ‘Harga-harga sedang naik pada masa Rasulullah saw. sehingga orang-orang berkata, ‘Wahai Rasulullah, kami berharap anda memberikan harga (menetapkan harga-harga).’ Beliau (saw.) bersabda: ‘Sesungguhnya Allah adalah Sang Pencipta, Yang Menggenggam (*Qabidh*), Yang Membuka Tangan (*Basit*), Yang Memberi Rezeki (*Raziq*), Yang Memberi Harga (menetapkan harga-harga); dan aku berharap aku akan bertemu Allah dengan tidak ada seorang pun yang menuntut (komplain) kepada diriku atas tindakan tidak adil yang aku lakukan terhadap dirinya, baik dalam hal darah ataupun kepemilikan.’³⁹

Uang Kertas

Dunia saat ini berjalan dengan sebuah mata uang berbahan dasar kertas yang tidak dilandaskan kepada emas dan tidak memiliki nilai intrinsik. Nilai yang dimiliki oleh kertas-kertas tersebut berasal dari kepercayaan orang-orang terhadap perekonomian dan pemerintahan yang mencetak mata uang. Salah satu kezaliman terbesar yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan yang ada saat ini adalah kuasa bebasnya dalam mencetak uang dan meningkatkan suplai uang dalam perekonomian. Ini berdampak pada inflasi, yang dalam beberapa kasus di Dunia Islam bahkan mencapai taraf hiperinflasi –di mana mata uang terdevaluasi berdasarkan hitungan jam.

Negara Khilafah tidak dapat hanya mencetak uang yang dipandanginya cocok. Uang di negara Khilafah harus didasarkan pada emas atau perak. Uang

³⁷ *Ibid.*, h. 206.

³⁸ *Ibid.*, h. 210.

³⁹ Musnad Ahmad, diriwayatkan oleh Anas ra.

kertas dapat disirkulasikan, akan tetapi uang kertas ini harus dapat dialihkan 100% nilainya pada emas atau perak.⁴⁰

Perpajakan

Perpajakan yang dapat diterapkan di dalam negara Khilafah telah diberi batasan oleh syari'at. Jika pajak tetap seperti *Kharaj*, *Jizyah*, dan *Ushur*, tidak mencukupi untuk membiayai negara, maka pajak kekayaan dapat diterapkan. Akan tetapi, pajak ini hanya dapat diterapkan pada kelebihan kekayaan dari seseorang, bukan pajak atas penghasilan mereka atau barang-barang dan jasa-jasa mereka. Perpajakan yang zalim seperti pajak pertambahan nilai terhadap barang-barang dan jasa-jasa, ataupun pajak penghasilan, dilarang.

Terkait pajak yang tidak adil itu Rasulullah saw. pernah bersabda:

'Para penarik pajak (seperti yang diharamkan tadi) tidak akan memasuki Surga.'⁴¹

⁴⁰ Taqiuddin an-Nabhani, 'The Economic System of Islam,' *op cit.*, h. 268.

⁴¹ Abdul Qadeem Zalloom, 'Funds in the Khilafah State,' diterjemahkan dari *Al-Awwal fi Dawlah al-Khilafah*, Al-Khilafah Publications, 1988, h. 120.

SIMPULAN

Dari diskusi singkat ini telah jelas bahwa model pemerintahan totaliter tidaklah dapat disamakan dengan sistem kekuasaan Khilafah. Meskipun para politisi dan akademisi mencoba dan menginterpretasikan Khilafah dengan model-model yang telah eksis seperti monarki, kekaisaran (*imperium*), atau federasi, Khilafah pada faktanya merupakan sebuah sistem pemerintahan yang unik.

Penghubungan antara Islam dan Khilafah dengan Nazisme dan totalitarianisme yang selama ini diberi kedok perdebatan intelektual dan akademik hanya memiliki satu tujuan, yakni menambah bahan bakar dalam ‘perang melawan teror’ yang pada faktanya merupakan ‘perang melawan Islam.’

Kampanye propaganda melawan Islam dan Khilafah sesungguhnya akan benar-benar gagal, sebagaimana ia telah berlaku di masa Nabi saw. Kampanye menyetankan Islam oleh kaum Quraysh justru memakan tuannya, dan justru sesungguhnya semakin menarik lebih banyak orang untuk mendengarkan pesan yang dibawa oleh Nabi saw. Semakin tertariknya banyak orang di Barat terhadap Islam dan semakin banyaknya orang Barat yang masuk Islam dan menjadi *muallaf*— yang belum pernah terjadi sebelumnya— menunjukkan bahwa propaganda ini sedang menuruni tangga kegagalan. Dukungan bagi Khilafah dan keterpaksaan Barat untuk menggunakan kekerasan dalam rangka mencoba untuk mencegah berdiri kembalinya Khilafah juga menunjukkan bahwa propaganda ini sedang mengalami kegagalan.

Maka marilah kita akhiri diskusi ini dengan berita baik yang diberikan oleh Nabi saw. kepada kita mengenai kembalinya Khilafah setelah umat Islam hidup di dalam berbagai sistem zalim, sebagaimana keadaan umat Islam saat ini.

Rasulullah saw. bersabda: ‘Kenabian akan berada di antara kalian selama Allah berkehendak, kemudian Ia akan menghilangkannya jika Ia berkehendak. Kemudian sebuah Khilafah yang mengadopsi Kenabian akan muncul selama Allah berkehendak, kemudian Ia akan menghilangkannya jika Ia berkehendak. Kemudian akan terdapat sebuah monarki yang menggigit selama Allah berkehendak, kemudian Ia akan menghilangkannya jika Ia berkehendak. Kemudian akan terdapat sebuah monarki yang zalim selama Allah berkehendak, kemudian Ia akan menghilangkannya jika Ia berkehendak. Kemudian sebuah Khilafah yang mengambil jalan Kenabian akan muncul’ dan beliau (Rasulullah saw.) terdiam.⁴²

⁴² Musnad Ahmad.